

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mengusung konsep negara demokrasi, di mana pada sistem ini partai politik diberi kebebasan untuk bergerak dengan tujuan negara mendapatkan kesejahteraan. Di alam sistem demokrasi modern partai politik memiliki peran yang menentukan yaitu menterjemahkan nilai dan kepentingan masyarakat dari bawah ke atas sehingga nilai dan kepentingan tersebut menjadi rancangan undang-undang peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat.¹ Akan tetapi, pada kenyataannya partai politik lupa akan fungsinya dan cenderung hanya dijadikan alat untuk memperoleh dan berbagi kekuasaan. Carl J. Friedrich menyatakan partai politik sejatinya merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi-apirasi dari masyarakat. Namun pada kenyataan saat ini, partai politik telah mulai kehilangan arah dan tujuannya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan sederhana dari setiap partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.²

Kuatnya iklim kompetisi partai-partai dalam mendapatkan kekuasaan dapat mengakibatkan menipisnya ideologi partai karena munculnya politik kartel. Menurut Kuskridho, politik kartel adalah politik di mana partai dan aktivitasnya tidak lagi mengusung kepentingan konstituen atau kepentingan publik, tetapi mengurus diri sendiri dan politik menjadi profesi dalam dirinya. Partai tak lagi mengusung atau mewakili segmen masyarakat tertentu yang eksklusif tetapi mengutamakan program partai yang

¹ Meyer, T. (2012). *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 30

² Friedrich, Carl J. (1967). *Constitutional Government and Democacy: Theory and Practice in Europe and America*. Dalam Labolo, M. dan Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 181

efektif, efisien dan pragmatis. Ciri-ciri politik kartel yaitu kecenderungan partai untuk secara samar melepas ideologinya demi kepentingan yang lain, memelihara kerja sama dengan partai lain yang berbeda ideologi, memelihara akses sumber dana partai, dan lain-lain. Karena itu perbedaan ideologi dalam sistem politik kartel menjadi kabur.³

Ideologi partai merupakan ciri paling utama yang membedakan suatu partai dengan partai lainnya. Ideologi harus mampu ditanamkan dengan baik oleh partai kepada kadernya karena pola kaderisasi yang tidak beres dapat menyebabkan munculnya perilaku buruk partai politik yang dicerminkan oleh kadernya. Kaderisasi atau proses pengkaderan merupakan pendidikan yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai atau ideologi tertentu, sehingga menghasilkan kader yang matang secara wawasan organisasi. M. Syafaat Habib menyatakan bahwa kaderisasi adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam organisasi, seperti halnya alam yang terus berputar kehidupannya organisasi selalu membutuhkan orang baru pada setiap masanya.⁴

Kaderisasi berfungsi untuk menempa keterikatan emosional dan ideologi para kadernya untuk kemudian diproyeksikan sebagai pengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Akan tetapi pada kenyataannya partai politik sering memotong mata rantai kaderisasi dengan mengutamakan calon pada pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur maupun pemilihan legislatif dari kalangan artis yang direkrut secara instan karena faktor popularitas dengan harapan dapat mendulang suara untuk kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya, banyak kader partai yang menjadi pemimpin nasional tidak mampu memikul tugas dan tanggungjawab yang diberikan, dan seringkali menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya.⁵

³ Kuskridho Ambardi, (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, dalam Labolo, M. dan Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 183

⁴ Habib, M. S. (1992). *Pedoman Dakwah* cet I. Jakarta: Wijaya.

⁵ Insan Harapan Harahap (2017) *Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional*. <https://repository.bakrie.ac.id/1246/>

Bagaimana mungkin partai politik memiliki anggota yang paham dengan ideologi, konsisten dengan warna partai, dan menjalankan peran politisi di tengah masyarakat untuk meraup hati dan suara rakyat apabila partai tidak memiliki kualitas politik. Tragis apabila sebuah partai tidak menerapkan kaderisasi di dalamnya, sehingga kedudukan mereka di kursi parlemen hanya sebuah kesia-siaan atau bahkan menjadi bumerang karena ketidak sanggupan meneruskan ideologi partainya.

Menyadari pentingnya kaderisasi demi keberlangsungan sebuah partai politik, beberapa partai politik berupaya melakukan proses pengkaderan. Baik partai nasionalis maupun partai Islam melakukan kaderisasi dengan berbagai model kaderisasi. Partai nasionalis seperti Gerindra dan NasDem menggunakan model kaderisasi terbuka dikarenakan kedua partai tersebut dapat menerima seorang kader tanpa ada kriteria-kriteria tertentu, tidak tertutup/diskriminatif dari latar belakang apa saja dapat menjadi kader partai dan dalam pengkaderan melalui tahapan berjenjang setiap anggota partai yang akan dijadikan kader harus melalui beberapa tahapan pengkaderan. Hal tersebut sedikit berbeda dengan model kaderisasi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mengusung nilai-nilai Islami yang dikembangkan melalui dakwah. PKS tidak menganut sistem terbuka melainkan tertutup/diskriminatif, partai ini merekrut calon-calon anggota yang memiliki nilai religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islami. PKS juga menggunakan pengkaderan berjenjang dengan melakukan pengkaderan melalui beberapa tahap.⁶

Selain PKS, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai Islam dengan pola kaderisasi yang cukup baik karena PKB ada kaitannya dengan partai Islam tradisional yang mampu berbaur dengan masyarakat desa dan juga hadir dalam kegiatan masyarakat desa seperti budaya Jawa, slametan, tahlilan dan lain lain, PKB bersifat santai

⁶ Ferdian, Kurniawan, Krisbiantoro & Indrajat (2020) Model Kaderisasi Partai Politik melalui Sayap Partai. *Jurnal Wacana Publik* Volume 14, No. 01, Juni 2020

dan sederhana karena membaaur sesuai dengan masyarakatnya.⁷ Rekrutmen politik partai PKB secara garis besar memprioritaskan calon pengusungnya dari kader Nahdlatul Ulama (NU) yang sesuai dengan ideologi partai Islam PKB dominan terhadap warga NU.⁸

PKB merupakan partai yang berdiri atas dasar keinginan dari warga Nahdlatul Ulama (NU) atau yang biasa disebut warga Nahdliyin. Sesuai dengan hasil Mukhtamar NU ke-27, disebutkan bahwa NU selaku organisasi agama Islam terbesar di Indonesia tidak diperbolehkan untuk dijadikan wadah politik. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Juli 1998 pasca lengsernya Presiden Soeharto, warga Nahdliyin mendeklarasikan berdirinya PKB di kediaman Ketua PBNU KH. Abdurrahman Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan⁹. PKB yang secara kultural lahir dari rahim NU dalam kehidupannya berusaha mencari massa dan melakukan kaderisasi melalui pondok pesantren.

PKB merupakan partai Islam tradisional, sehingga proses pengkaderan dilakukan mencakup berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali pesantren. Sebagai partai yang dominan terhadap warga NU tentu saja PKB secara otomatis juga dekat dengan pesantren. Seperti diketahui bahwa pesantren-pesantren di Indonesia sebagian besar merupakan pesantren NU. Data menunjukkan NU memiliki sekitar 26.000 pesantren, yang mencakup sebagian besar dari total populasi pesantren di Indonesia.¹⁰

Masyarakat dan pesantren saling bergantung dan saling mempengaruhi. Keberadaan dan situasi masyarakat akan mempengaruhi sistem program di pesantren sehingga dapat menentukan model budaya masyarakat. Sementara itu, mekanisme pembinaan di pesantren sedikit banyak dipengaruhi oleh performan kyai. Dalam keadaan demikian, peran kiai terhadap perubahan sistem nilai masyarakat demikian besar. Kyai

⁷ Nabela, Sinta (2022) *Open Rekrutmen dan Sistem Kaderisasi Partai Islam (Studi Komparasi DPC PKB dan DPD PKS di Kabupaten Grobogan tahun 2020-2021)*. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS

⁸ *Ibid*

⁹ Nuryanti, S. Masa Depan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

¹⁰ <https://www.nu.or.id/nasional/terjadi-secara-alami-pemerataan-pesantren-tidak-bisa-dipaksakan->

bahkan punya potensi untuk membolak-balik nilai baku yang telah berkembang sebelumnya.¹¹

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di salah satu pesantren yang menjadi basis kaderisasi PKB yaitu Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso yang beralamat di Jalan Letjen. H.M. Sarbini No. 125 Dukuh Wonoyoso Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso merupakan pondok pesantren yang berada di kota Kebumen karena berlokasi ± 1 km dari Kantor Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso saat ini diasuh oleh Ky. Hakim Musyafa. Dipilihnya pondok pesantren Al Hidayah Wonoyoso sebagai objek penelitian dikarenakan pondok pesantren Al Hidayah mempunyai kedekatan dengan DPC PKB Kebumen dimana pengasuh pondok pesantren menjabat sebagai dewan syuro DPC PKB Kebumen.

Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini berfokus pada transformasi pola rekrutmen dari konvensional ke digital/modern, penguatan personal branding kader, serta mengatasi hambatan struktural dalam regenerasi. Penelitian terkini juga menyoroti pentingnya keterlibatan kader dalam kegiatan sosial untuk memperkuat citra inklusif partai.¹² Untuk itu,, perlu adanya penelitian yang membahas tentang kaderisasi PKB di pesantren karena pesantren dan PKB memiliki ikatan kultural dan sejarah yang kuat, karena PKB lahir dari rahim NU. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso Kebumen”.

¹¹ Abdul Wahid Zaini, *Moralitas Pendidikan Pesantren* (Yogyakarta: Lembaga Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, 1996), 3.

¹² Ardy Susanto, Marlinda Irwanti Poernomo (2025) Personal Branding Kader PKB dalam Mendukung Citra PKB Sebagai Partai Terbuka (Inklusif). Inovasi : *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Volume. 4 Nomor. 3 September 2025*

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kebumen terhadap santri Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso Kebumen?
2. Bagaimana dampak dari kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kebumen terhadap santri Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso Kebumen?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kebumen terhadap santri Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso Kebumen
2. Menganalisa dampak dari kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kebumen terhadap santri Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso Kebumen

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kajian politik pemerintahan dalam kaitannya dimensi politik santri.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman secara nyata serta menjadi bekal pengetahuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan

- permasalahan yang akan mendatang.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu untuk melihat secara luas kontribusi beserta panggung politik santri.
- c. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang dimensi panggung politik santri.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mampu menjadi informasi tambahan terkait dengan penelitian, penelitian terdahulu juga dapat dijadikan acuan bagi penulis untuk menambah perspektif lainnya dalam penelitian sejenis. Maka dari itu penulis akan memberikan beberapa literatur terkait penelitian yang akan dilakukan, adapun penelitian yang sama dengan judul penelitian penulis tidak ditemukan, namun terdapat sejumlah penelitian yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan materi penelitian penulis antara lain;

Penelitian Yuni Femilia (Skripsi, 2017), dari Fakultas Ushuluddin, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, tentang “Pola Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Meningkatkan Kualitas Berpolitik” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Bandar Lampung beserta faktor pendukung dan penghambatnya, dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa kaderisasi yang dilaksanakan oleh DPC PKB Bandar Lampung kepada masyarakat terbagi menjadi tiga tahap. Tahapan yang pertama anggota kader harus mengikuti Pendidikan Kader Pertama (PKP) dengan tujuan agar para kader memiliki rasa mencintai bangsa dan negara dan juga partai dalam hal ini PKB. Setelah melaksanakan PKP para anggota kader yang siap diterjunkan ke masyarakat akan diberi kesempatan berupa menerima aspirasi, tidak berhenti di situ para kader juga dituntut untuk mampu memprjuangkan aspirasi yang sudah

mereka terima. Adapun tahapan yang terakhir yakni, pelatihan terhadap para kader yang akan mengisi kursi-kursi elit di parlemen ataupun akan menjadi politisi DPC PKB Kota Bandar Lampung dengan memperkenalkan cara kepemimpinan beserta teorinya. Bentuk kaderisasi yang dilaksanakan oleh DPC PKB Kota Bandar Lampung di antaranya Workshop, Pendidikan Kilat (Diklat), kampanye, seminar, dan dialog. Penulis juga menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan kaderisasi tidak melulu berjalan lancar, sebab tingkat pendidikan yang rendah membuat kegiatan tak semulus yang diharapkan.

Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh Yuni Familia dengan penelitian ini adalah pola/strategi kaderisasi yang dilakukan oleh PKB di lingkup cabang (kabupaten/kota) dengan cara-cara tertentu, untuk memperoleh kader yang bermutu. Adapun perbedaannya adalah mengenai objek penelitiannya. Penelitian ini mengedepankan strategi kaderisasi yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Kebumen kepada santri-santri Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso, sedangkan penelitian Yuni Familia mengedepankan pola kaderisasi yang dilaksanakan oleh DPC PKB Kota Bandar Lampung kepada masyarakat secara luas, dalam hal ini warga masyarakat Kota Bandar Lampung.

Penelitian Alfi Zahrinna (Tesis, 2022) dari IAIN Kudus *tentang Strategi Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Terhadap Peningkatan Kualitas Kader Dalam Berpolitik*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Strategi Kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus Terhadap Peningkatan Kualitas Kader Dalam Berpolitik yaitu melalui Pendidikan Kader Pertama (PKP) diharapkan bisa menjaga keberlangsungan dan akselerasi program perjuangan partai dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan PKB. Melalui pendidikan pemula ini para kader diharapkan memiliki semangat tinggi untuk mengembangkan partai PKB dimasyarakat serta menjunjung tinggi NKRI. Ada tiga tahap pola pengkaderan di dalam partai PKB yaitu: 1) Tingkat dasar 2) Tingkat menengah

dan 3) Tingkat Lanjut. Menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya sesuatu. Adapun faktor pendukung dan penghambat Strategi Kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus Terhadap Peningkatan Kualitas Kader Dalam Berpolitik yaitu sebagai berikut: Faktor pendukung, pertama ada gaya kepemimpinannya, kedua rekrutmen kader dan kaderisasi, ketiga mempunyai relasi dengan rakyat, keempat adanya pendanaan, kelima wadah perjuangan. Faktor penghambat, pertama gaya kepemimpinannya, kedua pengendalian kader dalam berpolitik ketiga, pengelolaan manajemen parpol belum berdasarkan *planning, organizing, actuating, controlling*.

Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh Alfi Zahrinna dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang strategi kaderisasi PKB. Adapun perbedaannya adalah mengenai objek penelitiannya. Penelitian ini mengedepankan strategi kaderisasi yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Kebumen kepada santri-santri Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso, sedangkan penelitian Alfi Zahrinna mengedepankan strategi kaderisasi yang dilaksanakan oleh DPC PKB Kabupaten Kudus kepada masyarakat secara luas, dalam hal ini warga masyarakat Kabupaten Kudus.

Penelitian Lutfiana Fauziyah (Skripsi, 2021) tentang Strategi Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik: Studi Strategi Rekrutmen dan Kaderisasi DPW PKB DIY melalui Gemasaba DIY. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan adanya penggunaan sumber daya internal dan eksternal PKB dalam proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan agar strategi berhasil. Strategi dilakukan melalui beberapa tahapan seperti setifikasi atau penentuan norma dan prasyarat hingga internalisasi ideologi kepartaian. Sarana yang digunakan dalam melaksanakan strategi tersebut adalah dengan memanfaatkan jaringan dengan organisasi kolateral yang ada seperti NU dan PMII. Hasilnya, DPW PKB DIY melalui Gemasaba DIY sukses melakukan rekrutmen dan

kaderisasi bagi segmentasi mahasiswa. Saat ini kader-kader Gemasaba DIY ini sudah mampu memberikan perubahan bagi PKB DIY. Penelitian ini juga menemukan adanya relasi kuasa yang bekerja dalam strategi yang dilakukan PKB DIY melalui Gemasaba DIY. Upaya ini bisa dilihat sebagai strategi memoderasi kekuatan lama dari PKB dan mencoba membuka peluang bagi kekuatan lain partai.

Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh Lutfiana Fauziyah dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang strategi kaderisasi PKB. Adapun perbedaannya adalah mengenai objek penelitiannya. Penelitian ini mengedepankan strategi kaderisasi yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Kebumen kepada santri-santri Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso, sedangkan penelitian Lutfiana Fauziyah mengedepankan strategi kaderisasi yang dilaksanakan oleh Kaderisasi DPW PKB DIY melalui Gemasaba DIY.

Penelitian Oktanila Faria, Susilo Utomo, dan D. G. Manar, (2016) tentang Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Pada DPW PKB Jawa Tengah), *Journal of Politic and Government Studies*. Berdasarkan temuan, sesuai peraturan partai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kader, Partai PKB melaksanakan jenjang kaderisasi dalam tiga tingkatan, yakni KTP (Pembentukan Kader Tingkat Pemula), KTM (Pembentukan Kader Tingkat Menengah), KTA (Pembentukan Kader Tingkat Lanjutan). Kesimpulannya, pembentukan kader yang dilaksanakan oleh DPW Partai PKB di Jawa Tengah pada periode 2012-2017 kurang demokratis, hal ini terjadi karena partai tersebut belum memiliki agenda kerja seperti pada AD/ART partai

Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh Oktanila. Faria, Susilo Utomo, dan D. G. Manar dengan penelitian ini yaitu meneliti kaderisasi PKB. Adapun perbedaannya adalah mengenai objek penelitiannya. Penelitian ini mengedepankan strategi kaderisasi yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Kebumen kepada santri-santri Pondok

Pesantren Al Hidayah Wonoyoso, sedangkan penelitian Oktanila. Faria, Susilo Utomo, dan D. G. Manar mengedepankan pola kaderisasi yang dilaksanakan oleh DPW PKB Jawa Tengah.

Penelitian Ardy Susanto dan Marlinda Irwanti Poernomo (2025) tentang Personal Branding Kader PKB dalam Mendukung Citra PKB Sebagai Partai Terbuka (Inklusif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra pribadi dari kader PKB ikut mendorong PKB sebagai partai terbuka (inklusif) yang sangat terbuka keanggotaannya kepada masyarakat secara pluralistik. Sebagai simpulan menyatakan bahwa citra kader PKB berkontribusi memperkuat citra partai sebagai entitas inklusif yang merangkul semua golongan di Indonesia. Keterlibatan aktif kader dalam komunikasi politik dan kegiatan sosial seperti perayaan imlek, menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik

Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh Ardy Susanto dan Marlinda Irwanti Poernomo dengan penelitian ini yaitu meneliti kaderisasi PKB. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan peneliti meneliti tentang strategi kaderisasi yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Kebumen kepada santri-santri Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso, sedangkan penelitian Ardy Susanto dan Marlinda Irwanti Poernomo mengedepankan personal branding kader PKB.

Penelitian Laela Ashari (2020) tentang Model Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilihan Kepala Daerah Batanghari Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pola kandidasi yang dilakukan PKB dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 dilakukan melalui pola kandidasi yang dicetuskan oleh Arya Budi, yaitu persetujuan pimpinan PKB (seleksi elit) oleh DPP PKB, memenuhi syarat sesuai regulasi (seleksi regulasi) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan keterpilihan dalam Pilkada 2020 (seleksi publik) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batanghari. Model kandidasi ini dilakukan PKB agar calon yang diusung memang sesuai dengan cita-

cita pendirian PKB dan dapat diterima oleh masyarakat karena memiliki kemampuan yang diperlukan dalam memimpin organisasi pemerintahan, namun konsep Arya Budi bukanlah suatu konsep yang paling ideal untuk parpol, (2) Latar belakang yang mendasari penetapan PKB terhadap M. Fadhil Arief sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 karena alasan kemampuan manajerial yang baik, tingkat keterpilihan dalam Pilkada yang tinggi dibandingkan calon-calon lainnya dan karena memiliki riwayat keterkaitan dengan NU yang menjadi basis utama PKB.

Persamaan penelitian yang dilaksanakan oleh Laela Ashari dengan penelitian ini yaitu meneliti kaderisasi PKB. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan peneliti meneliti tentang strategi kaderisasi yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Kebumen kepada santri-santri Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso, sedangkan penelitian Laela Ashari mengedepankan model kaderisasi PKB dalam pemilihan kepala daerah.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Teori Partai Politik

Secara etimologis, kata partai berasal dari bahasa Latin *pars*, yang berarti “bagian”. Atau dapat dipahami bahwa partai merupakan suatu bagian, oleh karena itu, konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lain. Sehingga idealnya tidak mungkin di dalam suatu negara hanya terdapat satu partai saja. Sedangkan kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang artinya kota atau komunitas secara keseluruhan. Plato dalam bukunya yang berjudul *The Republik* membuat sebuah pemahaman bahwa konsep polis ialah terciptanya masyarakat yang ideal. Hal ini berarti politik ialah segala usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik. Sedangkan Aristoteles dalam bukunya yang

berjudul *The Politics* mengungkapkan bahwa manusia adalah binatang politik (*political Animal*) yang berarti aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan secara alamiah dalam diri setiap manusia.¹³

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Menurut Sigmund Neumann dalam *Modern Political Parties* mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan Carl J. Friedrich menyebutkan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal atau materiil.¹⁴ Sementara itu, Max Weber dalam bukunya yang berjudul *Economie et Societe* mendefinisikan partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik.¹⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk membentuk opini publik sehingga dapat membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan

¹³ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Cet. Ke-1, 9-10

¹⁴ *Ibid*, 11

¹⁵ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta, Yayasan. Obor Indonesia, 2012). 66

keuntungan dari dukungan tersebut.

a. Prinsip-Prinsip Partai Politik

Menurut Hafied Cangara partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu partai sebagai:¹⁶

1. Koalisi

Partai sebagai koalisi yaitu membangun kekuatan mayoritas dengan membentuk koalisi dari berbagai kepentingan. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering mengacaukan kesatuan partai karena satu sama lain berusaha untuk menjadi dominan dalam partai. Ketidakcocokan dalam partai terutama muncul dalam penetapan asas perjuangan, program, kepengurusan organisasi, dan pencalonan kandidat.

2. Organisasi

Partai sebagai organisasi yaitu mengelola partai politik untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan dana, dan membuat isu propaganda dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan mobilisasi kepada anggota-anggotanya untuk loyal kepada partai.

3. Pembuat kebijakan (policy making).

Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal

¹⁶ Hafied Cangara, Komunikasi Politik, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 209

pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian di mana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai.

b. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Menurut Miriam Budiardjo terdapat empat fungsi partai politik yaitu:¹⁷

1. Sarana komunikasi politik

Partai politik berfungsi sebagai komunikator sekaligus komunikan politik yang menyampaikan segala informasi tidak hanya dari pemerintah yang terkait regulasi, keputusan-keputusan, dan kebijaksanaan, tetapi juga aspirasi yang mereka tampung dari masyarakat. Kedudukan partai politik yang berada di antara masyarakat dan pemerintah membuat partai politik menjadi suatu komponen penting dalam sistem politik.

2. Sarana sosialisasi politik

Secara harfiah, sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sedangkan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik ini partai politik berusaha untuk menanamkan ideologi partai kepada masyarakat. Proses sosialisasi

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). 163-164

tersebut dilaksanakan baik secara sengaja dengan cara formal ataupun nonformal, maupun dengan cara tidak disengaja yaitu melalui hubungan bermasyarakat sehari-hari. Dalam sosialisasi politik terdapat dua metode penyampaian pesan yaitu melalui pendidikan politik dan indoktrinasi politik

3. Rekrutmen politik

Menurut Gabriel Almond (1966), proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan latihan. Sedangkan Jack C. Plano mengartikan bahwa proses rekrutmen sebagai pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Sedangkan rekrutmen politik menunjuk pada pengisian pada posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen, sedangkan yang tidak formal adalah perekrutan aktivis dan propaganda.

4. Pengatur konflik.

Pada sistem politik di negara yang demokratis, pengendalian konflik tersebut merupakan fungsi dari partai politik. Konflik jangan dianggap sebagai penghalang dalam mencapai suatu tujuan akan tetapi hendaknya konflik dipahami sebagai jalan untuk mencapai kebaikan bersama. Kebaikan bersama akan tercapai apabila partai politik mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui cara-cara yang dialogis. Cara-cara dialogis yang dimaksud ialah dengan menerima dan mengumpulkan berbagai aspirasi dan kepentingan pelaku konflik lalu

membahasnya dalam musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil dari musyawarah tersebut ialah solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik secara win-winsolution. Agar didapatkan solusi yang terbaik, para wakil rakyat dari masing-masing partai harus mau berkompromi dan meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai.

1.6.2. Teori Kaderisasi

Istilah kaderisasi berasal dari kata “kader”, kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata *carde* yang didefinisikan sebagai pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan.¹⁸ Dalam kata lain, kader diartikan sebagai orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah organisasi.

Kaderisasi lebih bersifat sebagai proses internalisasi dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya agar mampu menjadi fungsionaris partai baik dan siap menjalankan mandat yang diberikan partai untuk menduduki jabatan publik di pusat dan daerah. Kaderisasi partai politik juga berguna bagi sarana regenerasi atau reproduksi kepemimpinan nasional. Oleh karena kaderisasi harus dilakukan secara profesional. Kaderisasi sekaligus juga berguna untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki loyalitas terhadap partai. Karakteristik kaderisasi yang ingin dihasilkan ini akan juga ditentukan oleh kecenderungan tipe dari partai yang bersangkutan. Agar proses kaderisasi ini dapat terjaga kesinambungannya, maka dibutuhkan pelembagaan sistem kaderisasi yang baku, berjenjang, dan menganut prinsip meritokrasi.¹⁹

¹⁸ Nanang. Fattah, *Landasan Management Pendidikan*. Cet ke-3. (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. 2000). 54-56

¹⁹ Syamsuddin Haris, Ikrar Nusa Bhakti, Moch. Nurhasim, Sri Nuryanti, Sri Yanuarti, Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, Irine H. Gayatri, Indriana Kartini, Sarah Nuraini Siregar, Aisah Putri Budiatri. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah partai politik, karena ini merupakan inti dari kelanjutan perjuangan partai ke depan dan juga inti dari keberadaan partai politik. Tanpa kaderisasi kepemimpinan, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah partai politik dapat bergerak dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah syarat mutlak dalam membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Kaderisasi sangat penting mengingat perlu ada transfer pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam suatu kajian tertentu. Fungsi kaderisasi dalam partai politik adalah mempersiapkan calon-calon untuk siap menerima mengelola partainya ke depan. Kaderisasi juga merupakan proses untuk melatih dan mempersiapkan anggota partai dengan berbagai keterampilan, disiplin ilmu dan pengalaman untuk mencapai tujuan partai.

a. Dimensi Kaderisasi

Ada dua dimensi utama yang penting dicermati dalam rangka melakukan pelebagaan sistem kaderisasi, yang sebenarnya menjadi ciri khas pelebagaan demokrasi dalam internal partai, yakni dimensi formal dan dimensi informal.

1. Dimensi Formal

Kaderisasi lebih ke arah formal melalui cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi tersebut.²⁰

2. Dimensi informal

Dalam kaderisasi informal, proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses

Pelayanan Masyarakat Kedeputan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2016). 50

²⁰ Insan Harapan Harahap (2017) *Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional*. <https://repository.bakrie.ac.id/1246/>

kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat. Hal ini dilihat dari kehidupan kanak-kanak hingga remaja dan dewasa sebagai proses pembentukan jati diri, sehingga memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam kaderisasi informal terdapat beberapa kriteria atau indikator yang memperlihatkan kelebihanannya, yaitu berkepribadian positif, gigih, mempunyai loyalitas, mempunyai dedikasi terhadap organisasi dan memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan YME sebagai penentu yang mutlak.²¹

b. Prinsip Kaderisasi

Kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut:²²

1. Terbuka.

Prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (training) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Kaderisasi perlu disertai jaminan bahwa semua kader yang telah menjadi anggota partai politik maupun anggota sayap partai yang memiliki potensi dan/ atau dengan penilaian lain yang telah ditentukan oleh partai politik yang sifatnya demokratis dapat mengikuti seluruh jenjang kegiatan kaderisasi. Dalam kaitan ini, perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan. Dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi

²¹ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Cet ke-3. (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada. 2006). 87

²² Syamsuddin Haris, *op.cit.* 52

kepemimpinan akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

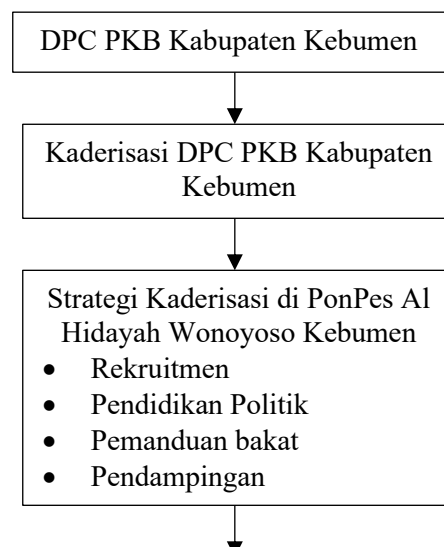
2. Non-Diskriminatif.

Pemberian akses yang sama dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti dan/atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku. Prinsip non-diskriminatif dalam kaderisasi sekaligus dapat mengurangi oligarkhi parpol terkait dengan kandidasi dalam kontestasi pemilu legislatif, kepala daerah dan presiden/wakil presiden serta pemilihan kader-kader partai di jabatan publik lainnya.

3. Berjenjang.

Penjenjangan kaderisasi parpol didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya. Rasionalisasi penjenjangan model hirarkhi ini bisa dilakukan karena alasan penjenjangan sebagai akibat pentahapan materi kaderisasi (materi bersifat piramidal) dan penjenjangan sebagai akibat pentahapan karir dalam organisasi (karir bersifat piramidal).

1.7. Kerangka Berpikir



1.8. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, atau dapat diartikan bahwa penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian diantaranya cara pandang subjek yang diteliti, tingkah laku dan lain-lain yang dituangkan dalam bentuk kata-kata. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.²³

Pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang rinci dan aktual dan melukiskan realita yang ada. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap orang di dalam lingkungannya, berinteraksi secara langsung baik kepada subjek penelitian maupun orang-orang disekitarnya, berusaha untuk memahami sudut pandang mereka terhadap dunia sekitarnya dengan tujuan mencoba menggali, memahami sudut pandang dan pengalaman mereka dalam rangka untuk memperoleh informasi yang diperlukan.²⁴

1.8.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan unsur yang penting dengan alasan data yang disajikan mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan lokasi penelitian. Dalam

²³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.1, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) 11

²⁴ *Ibid.* hlm. 51

hal ini ditetapkan lokasi penelitian di kawasan Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso.

Pesantren yang tertera di atas dipilih sebagai lokasi disebabkan dari pesantren tersebut banyak lahir aktor-aktor politik di Kabupaten Kebumen terkhusus di DPC PKB Kabupaten Kebumen baik secara internal maupun partisipan. Adapun DPC PKB Kabupaten Kebumen beserta Kantor Fraksi PKB Kabupaten Kebumen dipilih juga sebagai lokasi disebabkan penelitian ini memilih DPC PKB Kabupaten Kebumen sebagai objeknya.

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel penelitian dengan menetapkan kriteria-kriteria. Kriteria yang digunakan untuk menentukan informan yaitu pihak-pihak yang terkait ataupun memiliki hubungan akan dimensi politik santri di Kabupaten Kebumen terkhusus di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kebumen. Adapun yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Anggota Legislatif Fraksi PKB Kabupaten Kebumen.
- b. Tenaga Ahli Fraksi PKB Kabupaten Kebumen.
- c. Ketua DPC PKB Kabupaten Kebumen.
- d. Baik santri maupun Kyai dari Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso yang menjadi objek kaderisasi oleh DPC PKB Kabupaten Kebumen, baik itu menjadi internal maupun hanya pasrtisipan.

1.8.3. Sumber Data

Sebuah penelitian memerlukan pemahaman yang bersumber dari data dan ini sifatnya penting bagi seorang peneliti, untuk menunjang hal tersebut maka perlu adanya pendalaman data, ketepatan data, serta kelayakan informasi yang diperoleh. Dengan demikian sumber data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumbernya langsung sehingga peneliti melakukan komunikasi dengan responden, data ini diperoleh dengan cara wawancara, 23ocus23, ataupun eksperimen.

b. Data Sekunder

Merupakan data tambahan yang diperoleh peneliti dengan tujuan menunjang informasi sebagai bahan pelengkap sumber primer, data sekunder ini merupakan data tambahahan yang berasal dari arsip-arsip tambahan yang didapatkan dari berbagai sumber, serta foto pendukung dan data yang terkait pada bidang penelitian ini.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan antara lain:

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara kepada terwawancara untuk mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.”²⁵ Tanya jawab dilakukan dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan dan subjek penelitian menjawab pertanyaan. Sebelum peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti

²⁵ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta: Ramayana Press, 2008), 96.

membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti dengan tujuan agar proses wawancara akan lebih teratur dan terarah.

Wawancara dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, artinya wawancara dapat dilakukan dalam sekali atau beberapa kali tatap muka. Pertanyaan wawancara disusun dengan memperhatikan keleluasaan informan sehingga informan dapat memberikan informasi yang jelas dan terperinci.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap informan dari DPC PKB Kebumen dan informan dari Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat informasi berdasarkan apa yang disaksikan selama penelitian.”²⁶ Penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung yaitu dengan cara datang langsung ke tempat tujuan observasi. Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperoleh data-data keadaan lokasi penelitian, kegiatan yang dilakukan, kondisi di DPC PKB Kabupaten Kebumen dan Pondok Pesantren Al Hidayah Wonoyoso mulai dari sejarah berdirinya, visi, misi dan tujuan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik untuk mendapatkan informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen baik berupa buku-buku, majalah peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.”²⁷ Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan data berupa data pendukung atau tambahan, berupa dokumen, sumber data yang tertulis, foto dan ocustic yang berkaitan dengan DPC PKB Kabupaten Kebumen dan Pondok

²⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cet II, (Jakarta: Grafindo, 2003), 166.

²⁷ Edi Kusnadi, *Op.Cit* hlm. 102

Pesantren Al Hidayah Wonoyoso, serta pelaksanaan kegiatan pengkaderan

1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif adalah upaya yang digunakan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.²⁸ Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu proses berpikir yang bergerak dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan penerapan kaidah logika.²⁹

Dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data yaitu pengumpulan data, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*”.³⁰

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada proses ini mengedepankan perilaku memilah dan memilih data dari hasil penelitian lapangan seperti halnya wawancara, observasi dan lain sebagainya disesuaikan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan tahapan untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penyajian data ini harus disajikan secara jelas dan singkat agar mudah untuk dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Penarikan kesimpulan menjadi unsur yang penting dalam teknik analisis

²⁸ Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011). 248.

²⁹ *Ibid.* hlm. 249.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 246

data. Mengenai menarik kesimpulan, maka harus memperhatikan baik-baik data atau bukti yang disajikan dan harus mempertimbangkan bagaimana bukti tersebut dapat diperoleh. Adapun data, bukti, pertanyaan, beserta jawaban dari pertanyaan membawa penelitian terhadap kesimpulan.

Untuk menentukan keabsahan data digunakan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan membandingkan informasi mengenai fenomena yang sama dari berbagai sumber atau informan yang berbeda. Tujuannya untuk meningkatkan validitas, kredibilitas, dan mengurangi bias informasi, memastikan data yang diperoleh benar-benar objektif dan andal.